

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bergulirnya era reformasi di Indonesia saat ini telah memberikan peluang perubahan paradigma pembangunan secara lebih merata, adil, dan berimbang. Perubahan dimulai dari agenda reformasi salah satunya desentralisasi keuangan dan otonomi daerah. Sejak diberlakukannya yang dijelaskan dalam UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dilanjutkan dengan pengesahan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Desak Nyoman,Edy dan Made,2015).

Dengan adanya perubahan paradigma tersebut, pemerintah daerah dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab sesuai dengan konsep *good governance* (Iswahyudi, Triyuwono, Achsin,2016), selain itu menimbulkan konsekuensi bagi daerah dalam bentuk pertanggungjawaban atas pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien. Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan pemerintahan daerah karena erat kaitannya dengan kelangsungan kinerja sektor publik. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran untuk kelangsungan masyarakat banyak.

Sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya masukan paling kecil untuk mencapai keluaran yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Muindro renyowijoyo,2010:7).

Dalam pengelolaan pemerintah daerah, khususnya dalam penyusunan anggaran berkonsep *value for money*, mengindikasikan munculnya asimetri informasi yang muncul dalam teori keagenan, antara masyarakat dan SKPD yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) sehingga dalam penyusunan anggaran diperlukan prinsip akuntabilitas dan transparansi ke dalamnya (Firdiansyah dan sudana,2015).

SKPD-SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan, dan juga selalu merugi. Tuntutan baru agar *SKPD-SKPD* ini meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *Value for Money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *Value for Money* karena masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros).

Kasus yang menunjukkan fakta tersebut yaitu terdapat beberapa temuan BPK terhadap sejumlah SKPD yang ada di kota Batam. pada tahun 2017 BPK melakukan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (DTT), satu di antaranya di Pemko Batam. Dari pemeriksaan itu, BPK menemukan terjadi

kelebihan pembayaran atas penggunaan tenaga ahli. Itu untuk kegiatan jasa konsultasi pada tiga SKPD dan atas 16 paket pengerjaan. Beberapa diantaranya ditemui di RSUD dan Dinas Pendidikan. Temuan lainnya yaitu dari tujuh kabupaten/ kota di Kepri ditambah satu provinsi, ada satu laporan keuangan yang diragukan pertanggungjawabannya. Hal itu dikatakan Anggota VI BPK RI, Harry Azhar Azis, Sabtu (13/5) di Batam. Dari laporan yang didapat pihak BPK, ada penggunaan anggaran hingga miliaran rupiah yang sulit dipertanggungjawabkan pengeluarannya. Selain itu pada Desember 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan Untuk Dinas Pendidikan, menemukan ada pemahalan harga pada dua paket pengadaan aplikasi akuntansi pelaporan dana BOS.

Adanya kasus-kasus seperti di atas menunjukkan jika SKPD di kota Batam belum menjalankan fungsi perencanaan dan pengendalian dan masih belum dipahaminya prinsip transparansi dan akuntabilitas. SKPD merupakan satuan kerja perangkat daerah yang tujuan pembentukannya salah satunya adalah melayani kepentingan masyarakat atau publik. Hal ini menandakan bahwa sudah seharusnya SKPD melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah perlu melakukan pengelolaan dana publik yang didasarkan pada konsep *performance budgeting system* (anggaran kinerja) dengan cara dikembangkan sistem anggaran APBD yang berbasis kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Rosalina (2015) dalam penelitiannya mengatakan bahwa Implementasi prinsip *value for money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik khususnya dalam hal penganggaran.

Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau (Adri, Surya, & Azhar,). Penelitian lainnya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan pada anggaran berbasis kinerja (Adiwirya, 2015). Dalam penelitiannya Wandari, Sujana dan Putra, (2015) mengemukakan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. Rezky Mulya Anugriani (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep *Value for Money*.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi publik terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep *Value for Money* pada Pemerintah kota Batam.**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang belum tepat sasaran.
2. SKPD sebagai sarana untuk melakukan tindak kecurangan dan inefisiensi.
3. Akuntabilitas pengelolaan anggaran pada SKPD belum berjalan dengan baik.
4. Transparansi pengelolaan anggaran pada SKPD belum berjalan dengan baik.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka batasan masalah pada penelitian ini dibatasi pada pengaruh tiga variabel yang digunakan yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value for Money* pada pemerintah kota Batam tahun 2017.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan anggaran yang berkonsep *value for money*?
2. Bagaimana pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran yang berkonsep *value for money*?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran yang berkonsep *value for money*?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas publik dan transparansi publik terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai salah satu media untuk memperdalam ilmu akademik dan memahami lebih dalam penerapan ilmu pengetahuan pada tataran teori dan pengaplikasiannya; dan
2. sebagai referensi bagi pihak lain yang tertarik dengan kajian mengenai pengaruh akuntabilitas, transparansi, dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagi Pihak pemerintah Kota Batam

Dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai bahan informasi maupun sebagai bahan masukan dalam hal ini mengenai pengaruh akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

2. Bagi pihak lain

Diharapkan mampu menjadi sumber informasi yang dapat digunakan sebagaimana mestinya.